

Katalog : 9101009.14

Dinamika Ketenagakerjaan Riau 2019-2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**



Dinamika Ketenagakerjaan Riau 2019-2021

DINAMIKA KETENAGAKERJAAN RIAU 2019-2021

ISBN :

No. Publikasi : 14000.2240

Katalog : 9101009.14

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : x + 50 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Sumber Ilustrasi :

BPS dan www.freepik.com

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

DINAMIKA KETENAGAKERJAAN RIAU 2019-2021

Pengarah:

Misfaruddin

Penanggung Jawab:

Achmad Sobari

Penyunting:

Nelayesiana Bachtiar

Penulis:

Oldestia Vianny

Bekti Indasari

Pengolahan Data:

Oldestia Vianny

Bekti Indasari

Aulia Hasif

Layout:

Nurul Elisa

Afdi Rizal

KATA PENGANTAR

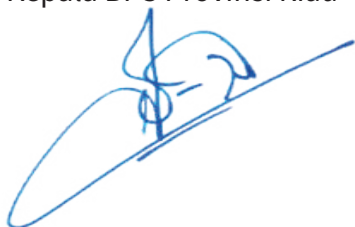
DINAMIKA KETENAGAKERJAAN RIAU 2019-2021

merupakan series publikasi isu terkini Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang menyajikan perkembangan ketenagakerjaan Riau antar waktu dan perbandingannya antar kabupaten/kota maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Data yang digunakan bersumber dari BPS. Data bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019-2021.

Publikasi isu terkini mengambil tema Dinamika Ketenagakerjaan Riau 2019-2021, tema ini memberikan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan di Riau sebelum, selama, dan saat kondisi ekonomi mulai pulih di masa pandemi COVID-19.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran terhadap publikasi ini sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Pekanbaru, September 2022
Kepala BPS Provinsi Riau



Misfaruddin



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB 1 Pendahuluan	1
Latar Belakang	3
Tujuan	4
Metode Penelitian	4
BAB 2 Kesempatan Kerja	7
Partisipasi Angkatan Kerja	9
Kesempatan Kerja	13
Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk	16
Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri	18
BAB 3 Kualitas Pekerjaan	23
Pekerja Penuh Waktu	25
Pekerja dengan Jam Kerja Normal (35-48 Jam Seminggu)	27
Pekerja Formal	29
BAB 4 Kompensasi Tenaga Kerja & Perbandingan Kesempatan Kerja, Kualitas Pekerjaan, Serta Kompensasi Tenaga Kerja	33
A. Kompensasi Tenaga Kerja	35
Dampak COVID-19 Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja	35
Upah Pekerja/Buruh/Karyawan	36
Pendapatan Pekerja yang Berusaha Sendiri	38
Pendapatan Pekerja Bebas	41
B. Perbandingan Kesempatan Kerja, Kualitas Pekerjaan, dan Kompensasi Tenaga Kerja	43
Perbandingan Kesempatan Kerja	44
Perbandingan Kualitas Pekerjaan	45
Perbandingan Kompensasi Tenaga Kerja	47
Daftar Pustaka	49

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Indikator/Variabel yang Digunakan dalam Penelitian.....	5
Tabel 2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Riau (Persen), 2019-2021	12
Tabel 2.2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kabupaten/Kota di Riau (Persen), 2019-2021	15
Tabel 2.3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021	18
Tabel 2.4. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021	22
Tabel 3.1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Penuh Waktu Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021	27
Tabel 3.2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama 35-48 Jam per Minggu Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021 ...	29
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021	31
Tabel 4.1. Rata-Rata Upah Pekerja/Buruh/Karyawan menurut Kabupaten/Kota di Riau (Ribu Rupiah), 2019-2021	37
Tabel 4.2. Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri menurut Kabupaten/Kota di Riau (Ribu Rupiah), 2019-2021	39
Tabel 4.3. Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas menurut Kabupaten/Kota di Riau (Ribu Rupiah), 2019-2021	42
Tabel 4.4. Indeks Kesempatan Kerja Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2019 & 2020	45
Tabel 4.5. Indeks Kualitas Pekerjaan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2019 & 2020.....	46
Tabel 4.6. Indeks Kompensasi Tenaga Kerja Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2019 & 2020.....	48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Riau (Persen), 2019-2021	10
Gambar 2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Riau (Persen), 2019-2021	11
Gambar 2.3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Jenis Kelamin di Riau (Persen), 2019-2021.....	13
Gambar 2.4. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Daerah Tempat Tinggal di Riau (persen), 2019-2021.....	14
Gambar 2.5. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Riau, 2019-2021.....	16
Gambar 2.6. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Daerah Tempat Tinggal di Riau, 2019-2021	17
Gambar 2.7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada 3 Lapangan Pekerjaan Utama di Riau, 2019-2021	19
Gambar 2.8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan Menurut Jenis Kelamin di Riau, 2019-2021	20
Gambar 2.9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Riau, 2019-2021	21
Gambar 3.1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Penuh Waktu di Riau, 2019-2021	26
Gambar 3.2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama 35-48 Jam per Minggu di Riau, 2019-2021	28
Gambar 3.3. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal di Riau, 2019-2021	30
Gambar 4.1. Indeks Kesempatan Kerja Provinsi Riau dan Indonesia, 2019 & 2020..	44
Gambar 4.2. Indeks Kualitas Pekerja Provinsi Riau dan Indonesia, 2019 & 2020	46
Gambar 4.3. Indeks Kompensasi Tenaga Kerja Provinsi Riau dan Indonesia, 2019 & 2020	47

PENDAHULUAN

1



TUJUAN

Memberikan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau sebelum, selama, dan saat kondisi ekonomi mulai pulih di masa pandemi COVID-19.



RUANG LINGKUP

Publikasi ini menyajikan data dan informasi tahun 2019 hingga tahun 2021.



SUMBER DATA

Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau, Survei Angkatan Kerja Nasional, dan Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Riau.



LATAR BELAKANG

Awal tahun 2020 hampir seluruh wilayah di dunia mengalami wabah virus Corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Semua wilayah waspada akan penyebaran wabah virus ini, tidak hanya waspada pada penyebaran penyakitnya saja akan tetapi juga waspada terhadap dampak yang timbul akibat fenomena ini. Dampak ini tentunya juga turut berimbas pada wilayah Provinsi Riau, betapa tidak perekonomian Riau pada tahun 2020 juga mengalami penurunan hingga 1,13 persen, serta terjadinya kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan.

Seiring berjalannya waktu, perekonomian Riau di awal tahun 2021 sudah mulai menunjukkan pemulihan. Sinyal perbaikan ekonomi terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Riau yang mulai meningkat. Bahkan di Triwulan II-2021 terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang perlahan merangkak ke arah pemulihan (BPS, 2021a) di akhir tahun 2020 terlihat belum secepat perbaikan pada kondisi ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari TPT Agustus 2021 yang belum benar-benar turun seperti kondisi tahun sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kondisi perekonomian yang sudah menuju ke arah pemulihan memberikan perubahan terhadap kondisi ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan dengan melihat lebih dalam perubahan di level kabupaten/kota sebelum, selama, dan saat kondisi ekonomi mulai pulih di masa pandemi COVID-19. Kondisi ketenagakerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini mengadopsi konsep daya saing tenaga kerja (Kemnaker, 2020), yang dilihat dari dimensi kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, dan kompensasi tenaga kerja.

Dimensi kesempatan kerja menggambarkan pemberdayaan, yaitu seberapa besar penduduk usia kerja dan angkatan kerja dapat terserap dalam dunia kerja. Hal ini menggambarkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan (ILO, 2015). Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang berarti menurunkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) serta menurunkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan rasio tenaga kerja terhadap jumlah penduduk/*Employment to Population Ratio* (EPR), serta serapan tenaga kerja pada lapangan usaha padat karya seperti industri pengolahan.

Dimensi kualitas pekerjaan menggambarkan pekerjaan yang “layak”. Salah satu pendekatan dalam menggambarkan pekerjaan layak adalah dari sisi penggunaan waktu bekerja dengan kondisi jam kerja yang tidak berlebih/*exceeds working hours* (BPS, 2021b). Jam kerja yang berlebih mengganggu produktivitas dan kesehatan pekerja itu sendiri terlebih di masa pandemi ini. Kualitas pekerjaan juga dapat terlihat dari status pekerjaan apakah formal atau informal. Pekerja informal cenderung memiliki upah/pendapatan yang relatif kecil, skill yang rendah, dan tidak memiliki jaminan sosial (BPS, 2020b). Pada masa pandemi COVID-19, pekerja informal lebih rentan mengalami pengangguran dan penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan karena pekerja informal banyak yang bergerak pada sektor yang terdampak. Selain itu, usaha informal umumnya berskala kecil dan rentan terhadap guncangan (ILO & OECD, 2020).

Indikator lain yang menggambarkan kualitas pekerjaan adalah jenis pekerjaan apakah pekerjaan *full time* atau paruh waktu. Pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (BPS, 2021b). Dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan salah satunya adalah pengurangan jam kerja (ILO & OECD, 2020).

Dampak lain pandemi COVID-19 pada pekerja adalah pengurangan upah/pendapatan (ILO & OECD, 2020). Oleh sebab itu, kajian ini juga menggunakan dimensi kompensasi tenaga kerja dalam bentuk upah/pendapatan yang dilihat dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh kaum marjinal seperti buruh/karyawan, dan pekerja informal.

TUJUAN

Dinamika Ketenagakerjaan Riau 2019-2021 ini secara umum ditujukan untuk mengetahui gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan Riau khususnya mengenai aspek kesempatan kerja, kualitas pekerjaan dan kompensasi bagi tenaga kerja selama 2019-2021. Secara khusus, bertujuan untuk mengkaji apakah pemulihan ekonomi telah membawa perubahan terhadap kesempatan kerja, kualitas pekerjaan dan kompensasi bagi tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Dinamika Ketenagakerjaan Riau 2019-2021 ini menyajikan data dan informasi tahun 2019 hingga tahun 2021. Dalam penyajian data dan informasi

berasal dari hasil survei internal BPS yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Selain itu, digunakan juga sumber-sumber lain seperti studi literatur hasil kajian atau penelitian terkait kesempatan kerja, kualitas pekerjaan dan kompensasi tenaga kerja, dan lain-lain.

Unit analisis yang digunakan adalah penduduk usia kerja, angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di kabupaten/kota se-Riau. Untuk mendefinisikan tiga dimensi ketenagakerjaan (kesempatan kerja, kualitas pekerjaan dan kompensasi tenaga kerja), kajian ini menggunakan 10 indikator (Tabel 1).

Tabel 1.1. Indikator/Variabel yang Digunakan dalam Penelitian

No	Variabel	Sumber Data
(1)	(2)	(3)
Dimensi Kesempatan Kerja		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau
2	Tingkat Kesempatan Kerja	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau
3	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau
4	Persentase Pekerja Sektor Industri	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau
Dimensi Kualitas Pekerjaan		
5	Persentase Pekerja yang Bukan Pekerja Paruh Waktu (Pekerja Full-Time)	Survei Angkatan Kerja Nasional
6	Persentase Pekerja dengan Jam Kerja Normal (35-48 Jam Seminggu)	Survei Angkatan Kerja Nasional
7	Persentase Pekerja Formal	Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Riau
Dimensi Kompensasi Tenaga Kerja		
8	Rata-Rata Upah Pekerja/Buruh/Karyawan	Survei Angkatan Kerja Nasional
9	Rata-Rata Pendapatan Pekerja Berusaha Sendiri	Survei Angkatan Kerja Nasional
10	Rata-Rata Pendapatan Pekerja Bebas	Survei Angkatan Kerja Nasional

Selanjutnya indikator pada ke tiga dimensi dihitung indeks nya pada masing-masing periode amatan. Penyusunan indeks komposit pada tiga dimensi tersebut dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Normalisasi data dengan metode maksimum minimum. Adapun nilai minimum-maksimum untuk setiap indikator mempertimbangkan pola data selama tahun 2019-2021.
2. Agregasi menggunakan metode aritmetik/linear dengan menggunakan bobot yang sama untuk setiap indikator (*equal weight*)
 1. Indeks Kesempatan Kerja (IKK)

$$(IKK)_{cpj} = \frac{X_{1pj} + X_{2pj} + X_{3pj} + X_{4pj}}{4}$$

2. Indeks Kualitas Pekerjaan (IKP)

$$(IKP)_{cpj} = \frac{X_{5pj} + X_{6pj} + X_{7pj}}{3}$$

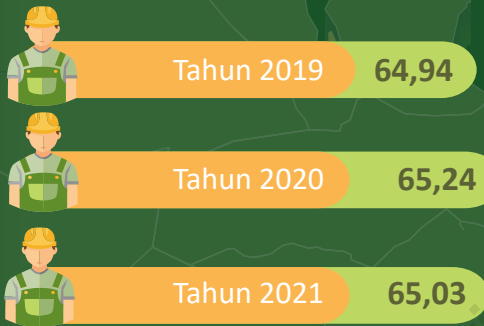
3. Indeks Kompensasi (IKM)

$$(IKM)_{cpj} = \frac{X_{8pj} + X_{9pj} + X_{10pj}}{3}$$

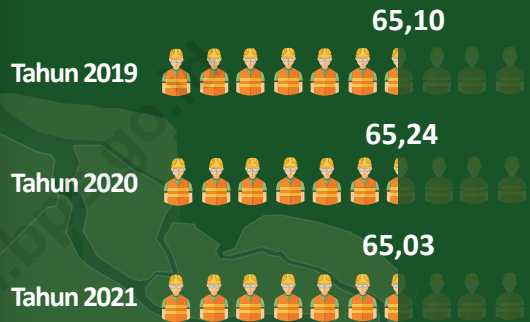
Indeks komposit pada publikasi ini diperoleh dari publikasi Analisis Inkesra Tematik Kajian Kesempatan Kerja, Kualitas Pekerjaan dan Kompensasi Tenaga Kerja di Masa Pandemi COVID-19. Indeks komposit Riau yang ditampilkan adalah periode Agustus 2019 dan Agustus 2020, sedangkan indeks komposit Riau Agustus 2021 belum tersedia.

KESEMPATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja



Persentase Pekerja Sektor Industri Pengolahan



Sumber:
Publikasi Keadaan Angkatan Kerja
Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan
2021 (diolah)

Isu ketenagakerjaan tentang pentingnya kesempatan kerja dan pekerjaan layak dalam pembangunan berkelanjutan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pilar ekonomi, tujuan 8 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua”. SDGs ini juga diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sudah diisi oleh pencari kerja (Sukirno, 2006). Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Masalah kesempatan kerja dan pengangguran sering dialami oleh suatu negara dan dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminalitas dan masalah ekonomi. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Kesempatan kerja timbul karena adanya investasi dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja. Strategi pembangunan yang diterapkan juga akan mempengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja.

Perkembangan indikator-indikator dalam dimensi kesempatan kerja antara periode sebelum pandemi (Agustus 2019), masa ekonomi dan ketenagakerjaan terpuruk (Agustus 2020) dan pada masa ekonomi mulai pulih (Agustus 2021) dapat dilihat pada uraian di bawah ini. Indikator dimensi kesempatan kerja pada kajian ini terdiri dari empat indikator pokok yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk/*Employment to Population Ratio (EPR)*, dan persentase pekerja sektor Industri.

Partisipasi Angkatan Kerja

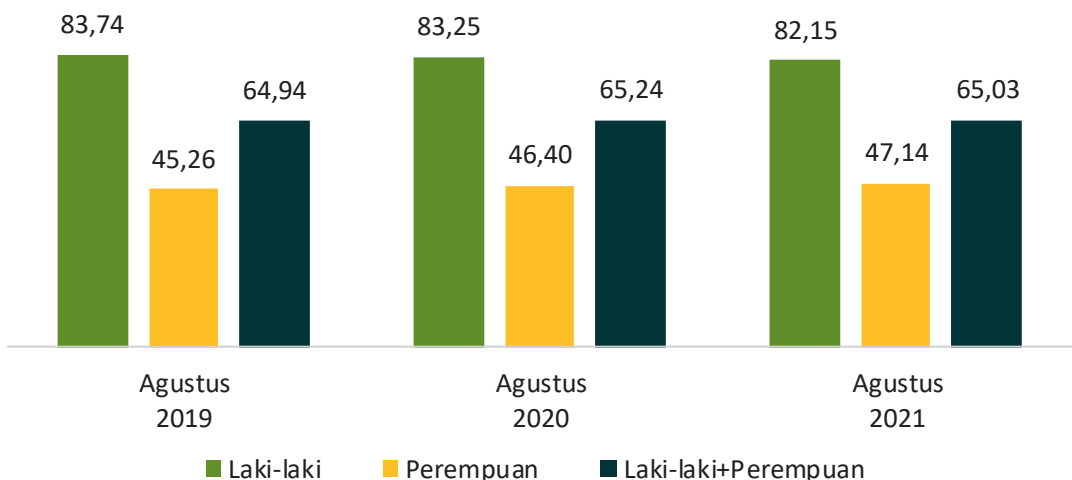
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Manfaatnya untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi juga pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang begitu besar bagi perekonomian masyarakat. Sejak awal pandemi hingga saat ini banyak

karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan lemahnya perekonomian keluarga. Penerapan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat sebagai usaha untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19 pada awal-awal kejadian mengakibatkan kegiatan ekonomi nyaris terhenti total. Banyak penduduk mengalami kejadian dirumahkan oleh pemberi kerja. Selain pembatasan jumlah pekerja yang beraktivitas di kantor atau pabrik, permintaan atau konsumsi domestik juga mengalami penurunan. Dampaknya, pendapatan masyarakat pun mengalami pengurangan, bahkan tidak sedikit mengalami pemutusan kerja. Hal ini berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka (TPT). Menurut data Sakernas Riau, TPT Agustus 2020 mencapai 6,32 persen. TPT menurun kembali menjadi 4,42 persen seiring mulai membaik kondisi perekonomian di Agustus 2021, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum COVID-19.

Secara total, pandemi COVID-19 relatif berdampak pada TPAK di Riau. Pada Agustus 2020 terjadi peningkatan TPAK sebesar 0,30 persen poin dibandingkan Agustus 2019, namun pada dengan Agustus 2021 terjadi penurunan sekitar 0,21 persen poin (Gambar 2.1). Sehingga selama tiga tahun terakhir TPAK naik dari 64,94 persen menjadi 65,03 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi di awal tahun 2021, partisipasi penduduk untuk bekerja juga semakin meningkat.

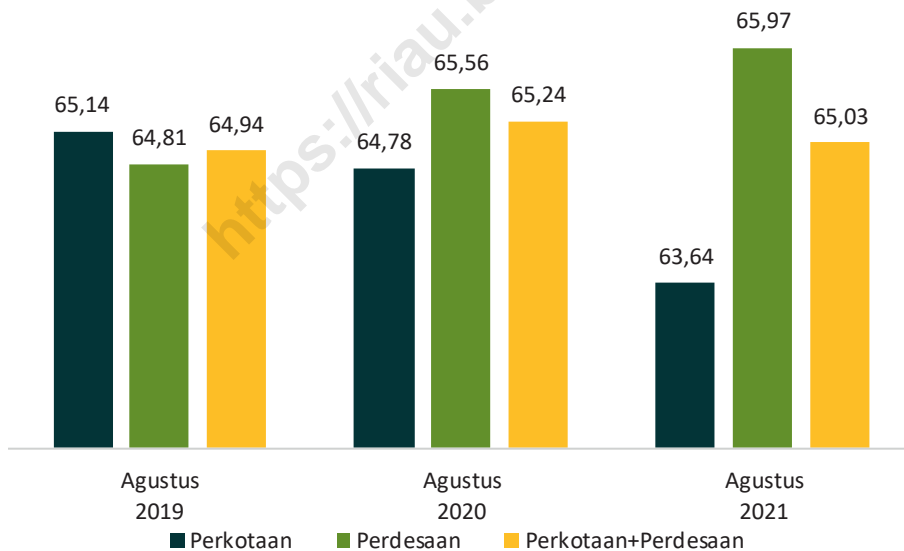
Gambar 2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Riau (Persen), 2019-2021



Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. TPAK laki-laki lebih tinggi hampir 2 kali TPAK perempuan. Namun jika diamati lebih lanjut, TPAK perempuan pada masa sulit pandemi COVID-19 (Agustus 2020) justru mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2019, sebaliknya TPAK laki-laki mengalami penurunan. Hal ini diduga akibat banyaknya tenaga kerja laki-laki yang terkena PHK dan atau dirumahkan selama pandemi COVID-19. Selain itu, meningkatnya partisipasi perempuan dalam bekerja adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah pandemi. Sementara pada saat yang sama penghasilan atau pendapatan dari kepala keluarga mengalami penurunan atau bahkan hilang sama sekali akibat terkena PHK. Perempuan memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana, hal ini ditunjukkan dengan mengambil tindakan nyata untuk menata kehidupan normal kembali dengan cepat, bahkan dalam kondisi yang terbatas (Shammi et al., 2020; Chang, 2020)

Gambar 2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Riau (Persen), 2019-2021



Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Kebanyakan pekerjaan tercipta di daerah perkotaan daripada di perdesaan. Jenis pekerjaan yang tersedia juga lebih bervariasi. Pandemi COVID-19 yang berdampak besar kepada sektor ekonomi berimbas pada penurunan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini tentunya berimbas pada TPAK yang lebih rendah di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan (Gambar 2.2). Selama pandemi COVID-19, TPAK penduduk di daerah perkotaan

mengalami penurunan, sedangkan TPAK penduduk di daerah perdesaan menunjukkan hal sebaliknya. Walaupun telah terjadi pemulihan ekonomi pada tahun 2021, TPAK penduduk perkotaan terus mengalami penurunan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa selama pandemi COVID-19 ini dampaknya lebih terasa untuk tenaga kerja yang tinggal di daerah perkotaan. Krisis ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19 membuat banyak penduduk kota terpaksa harus kembali ke desa. Penduduk kota yang melakukan ruralisasi atau kembali ke desa sebagian memilih bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian di perdesaan menjadi tumpuan para pekerja untuk bertahan di masa sulit. Ada pertimbangan kuat untuk pulang ke kampung halaman, yakni desa memiliki potensi untuk keberlanjutan hidup lebih tinggi ketimbang kota (Sindone-ws, 2021).

Tabel 2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Riau (Persen), 2019-2021

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	64,54	68,28	67,02
Indragiri Hulu	65,94	68,42	68,45
Indragiri Hilir	64,44	69,17	68,56
Pelalawan	69,00	68,21	69,18
Siak	64,77	62,78	64,69
Kampar	60,78	63,78	63,06
Rokan Hulu	67,85	65,26	66,50
Bengkalis	64,08	66,00	66,76
Rokan Hilir	61,21	56,54	60,74
Kep. Meranti	67,49	68,29	65,60
Kota Pekanbaru	65,86	65,22	61,61
Kota Dumai	69,12	67,15	64,91

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Pada Tabel 2.1 tampak bahwa perkembangan TPAK di empat kabupaten/kota yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar dan Kepulauan Meranti, memiliki pola yang sama dengan pola TPAK Riau, di mana mengalami peningkatan TPAK pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019, kemudian

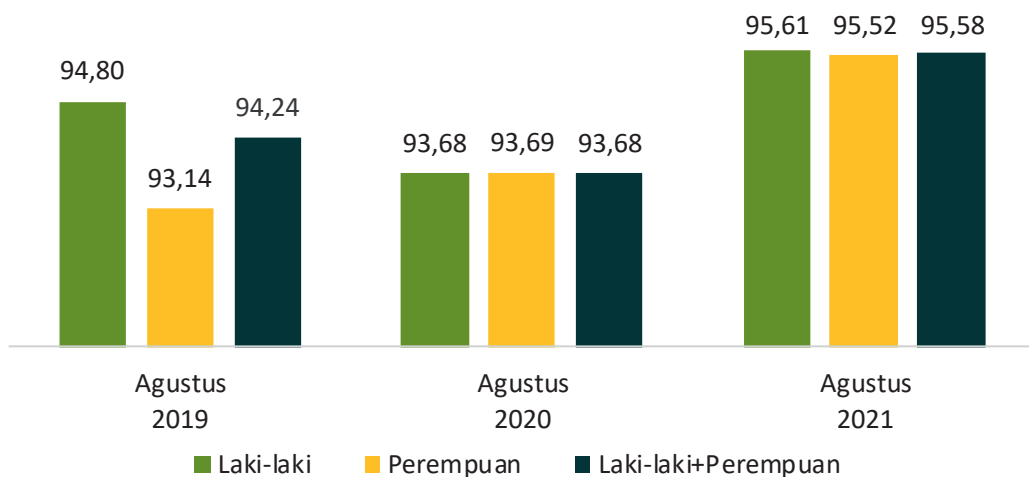
menurun kembali seiring pemulihan ekonomi pada Agustus 2021. Pola berbeda terjadi pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir yang mengalami penurunan TPAK ketika pandemi, namun kembali meningkat ketika ekonomi mulai pulih di awal tahun 2021. Sementara TPAK pada Kabupaten Indragiri Hulu dan Bengkalis tidak terkena dampak negatif selama pandemi, selalu meningkat hingga di Agustus 2021.

Kesempatan Kerja

Dimensi kesempatan kerja menggambarkan pemberdayaan, yaitu seberapa besar penduduk usia kerja dan angkatan kerja dapat terserap dalam dunia kerja. Hal ini menggambarkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan (ILO, 2015). Indikator lain sebagai pembentuk dimensi kesempatan kerja adalah Indikator kesempatan kerja, yaitu banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu lapangan pekerjaan dan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Indikator kesempatan kerja diukur berdasarkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, atau persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi. Angka TKK menggambarkan peluang penduduk yang termasuk angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Gambar 2.3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Jenis Kelamin di Riau (Persen), 2019-2021

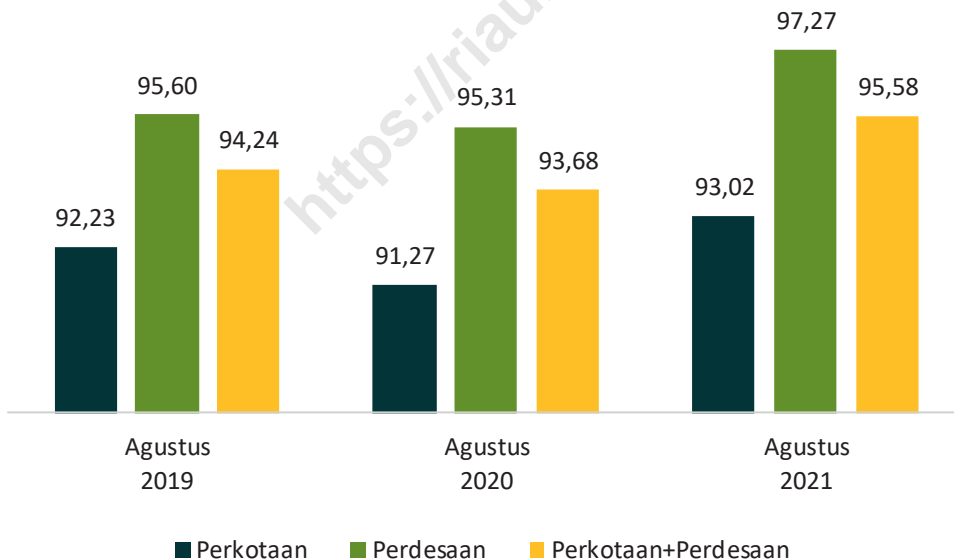


Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Pada Agustus 2020, nilai TKK di Riau adalah 93,68 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, 93 atau 94 orang memiliki pekerjaan. Kesempatan kerja tersebut lebih rendah dibandingkan Agustus tahun 2019 yang sebesar 94,24 persen. Pada masa kondisi ekonomi mulai pulih di masa pandemi (Agustus 2021) TKK meningkat kembali namun hanya sekitar 1,90 persen poin. Artinya TKK di Riau melebihi kondisi normal seperti sebelum pandemi terjadi.

Gambar 2.3 menunjukkan selama masa pandemi COVID-19 antara TKK laki-laki mengalami penurunan dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, sedangkan TKK perempuan justru meningkat. Namun TKK laki-laki mengalami pemulihan lebih cepat dibandingkan TKK perempuan sehingga selisih TKK laki-laki dan TKK perempuan pada Agustus 2021 hanya sekitar 0,09 persen poin. Sehingga, setelah pandemi COVID-19 TKK laki-laki dan perempuan justru lebih baik daripada kondisi sebelum pandemi.

Gambar 2.4 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Daerah Tempat Tinggal di Riau (Persen), 2019-2021



Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Secara umum TKK di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan TKK di daerah perkotaan. Pada Agustus tahun 2021 TKK di daerah perdesaan mencapai 97,27 persen, sedangkan TKK perkotaan hanya 93,02 persen. Baik TKK di daerah perdesaan maupun di perkotaan menurun pada pandemi COVID-19, namun dampaknya lebih terasa untuk tenaga kerja yang tinggal di

daerah perkotaan. Hal ini terlihat dari ketika telah terjadi pemulihan ekonomi di Agustus 2021, selisih penurunan TKK-nya dengan kondisi Agustus 2020 lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan.

Tabel 2.2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Kabupaten/Kota di Riau (Persen), 2019-2021

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	95,12	94,79	97,94
Indragiri Hulu	95,04	95,09	96,68
Indragiri Hilir	95,24	95,65	97,34
Pelalawan	95,12	94,01	97,66
Siak	95,67	94,20	95,66
Kampar	94,02	93,85	95,73
Rokan Hulu	95,29	95,58	97,75
Bengkalis	90,38	90,69	93,37
Rokan Hilir	95,04	95,20	96,75
Kep. Meranti	93,81	92,06	95,57
Kota Pekanbaru	92,14	91,44	91,71
Kota Dumai	93,53	91,81	93,71

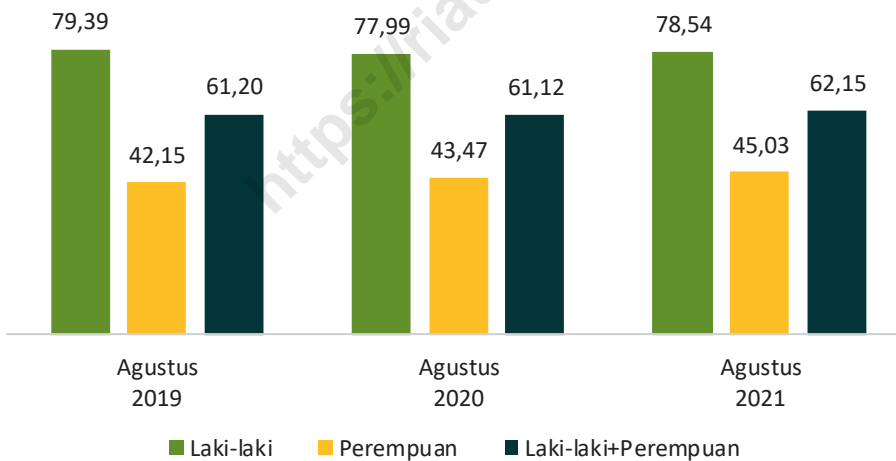
Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebagian besar kabupaten/kota memiliki pola yang sama dengan kesempatan kerja pada level provinsi, kecuali pada lima kabupaten seperti Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Pada lima kabupaten tersebut, TKK selalu menunjukkan peningkatan baik pada saat pandemi maupun pada saat ekonomi mulai pulih seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk

Berbanding terbalik dengan pola peningkatan TPAK, pandemi COVID-19 memberikan dampak pada penurunan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Di Riau pada Agustus 2020, rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Empoyment to Population Ratio/EPR*) mencapai 61,12 atau dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 61 orang yang bekerja. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019, terjadi penurunan EPR yang sebelumnya sebesar 61,20. Penurunan EPR mengindikasikan bahwa penyerapan penduduk bekerja menjadi lebih rendah. Setahun berikutnya (Agustus 2021) ketika kondisi perekonomian mulai pulih, EPR kembali naik 1,03 poin menjadi 62,15 sedikit lebih baik dari kondisi sebelum pandemi COVID-19. Peningkatan EPR Agustus 2021 terhadap Agustus 2020 mengindikasikan adanya peningkatan penyerapan penduduk bekerja pada Agustus 2021 dibandingkan bulan Agustus 2020.

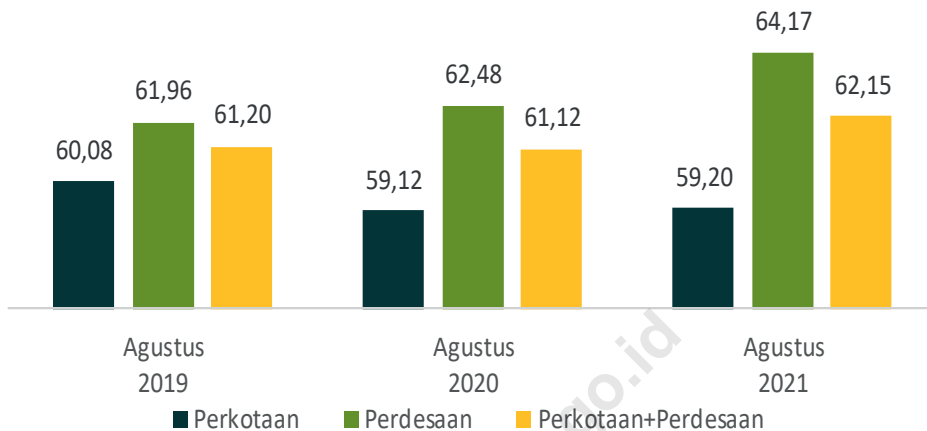
Gambar 2.5. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Riau, 2019-2021



Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Ditinjau dari jenis kelamin, secara umum EPR laki-laki lebih tinggi sekitar 1,5 kali dibandingkan EPR perempuan. EPR perempuan terlihat mampu bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 (seperti tampak pada Gambar 2.5). Baik pada Agustus 2020 maupun Agustus 2021, EPR perempuan terus mengalami peningkatan. Sedangkan EPR laki-laki sempat mengalami penurunan pada Agustus 2020. Walaupun pada Agustus 2021 EPR laki-laki kembali meningkat, namun belum mampu menyamai kondisi sebelum pandemi COVID-19.

Gambar 2.6. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Daerah Tempat Tinggal di Riau, 2019-2021



Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, EPR di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di wilayah perdesaan lebih baik daripada di perkotaan. Selama pandemi COVID-19 dampaknya juga lebih terasa untuk EPR di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan. Hal ini terlihat dari penurunan EPR di daerah perkotaan, sebaliknya EPR di daerah perdesaan justru mengalami peningkatan. Kemudian ketika kondisi ekonomi mulai pulih di Agustus 2021, EPR di daerah perkotaan sudah kembali mendekati normal seperti sebelum pandemi. Sedangkan EPR di perdesaan tetap naik sebesar 1,69 poin pada Agustus 2021, sehingga selisih EPR daerah perkotaan dengan daerah perdesaan semakin jauh.

Setiap kabupaten/kota memiliki nilai EPR yang bervariasi dari sekitar 57 sampai 67. Di Riau terdapat empat kabupaten yang memiliki pola sama dengan EPR pada level provinsi yaitu Pelalawan, Siak, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, selama dua tahun terakhir selalu mengalami penurunan persentase. Sedangkan sisanya selalu menunjukkan peningkatan EPR. Perubahan EPR di level kabupaten/kota selama sebelum pandemi, saat pandemi dan saat ekonomi mulai pulih di masa pandemi ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021

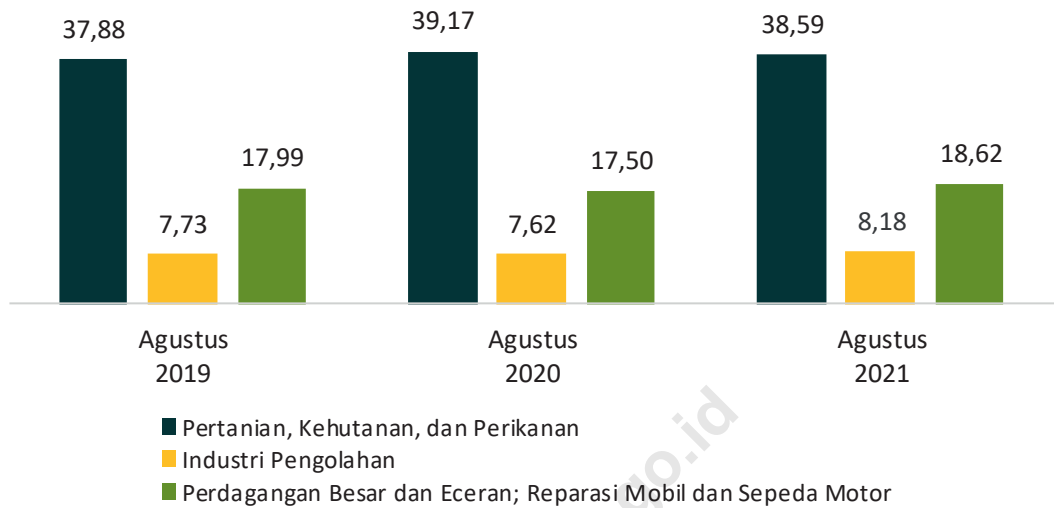
Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	61,25	64,72	65,64
Indragiri Hulu	62,83	65,06	66,18
Indragiri Hilir	61,42	66,16	66,73
Pelalawan	65,80	64,12	67,56
Siak	62,15	59,14	61,88
Kampar	57,26	59,86	60,37
Rokan Hulu	64,80	62,37	65,00
Bengkalis	58,12	59,86	62,33
Rokan Hilir	58,39	53,83	58,77
Kep. Meranti	63,46	62,87	62,70
Kota Pekanbaru	60,92	59,64	56,50
Kota Dumai	64,80	61,65	60,83

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri

Struktur penduduk yang bekerja di Riau sampai saat ini lebih didominasi pada lapangan usaha/sector pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada masa pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi terpuruk (Agustus 2020), lapangan usaha tersebut mampu menyerap 39,17 persen tenaga kerja (Gambar 2.7). Dengan kata lain dari 100 penduduk yang bekerja, sekitar 39 atau 40 diantaranya bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Menyusul di urutan kedua dan ketiga, penduduk lebih banyak bekerja di lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan eceran serta sektor industri pengolahan.

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada 3 Lapangan Pekerjaan Utama di Riau, 2019-2021



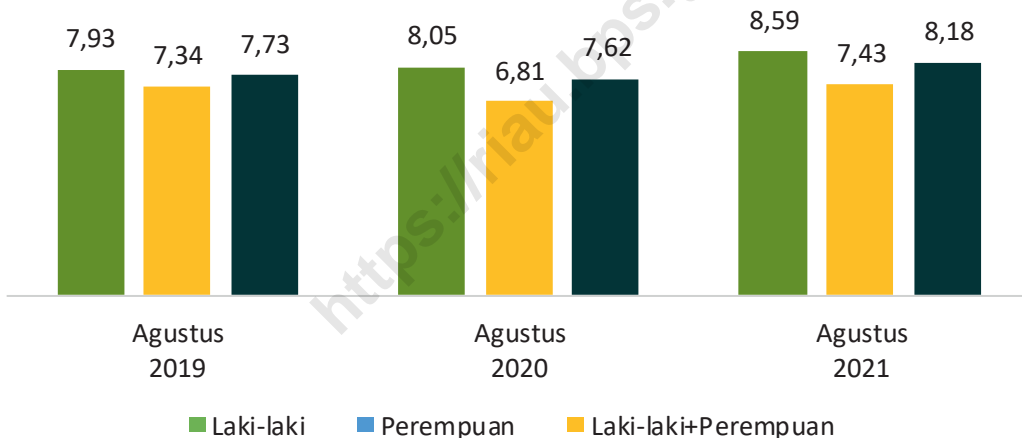
Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Dalam perkembangannya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan serapan tenaga kerja pada masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat pada Agustus 2020, di mana penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 1,18 juta atau sekitar 39,17 persen dari total tenaga kerja di Riau. Sementara Agustus 2019 penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1,13 juta orang atau 37,88 persen dari tenaga kerja Riau. Ketika keadaan ekonomi mulai membaik di Agustus 2021, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 0,58 poin.

Di sisi lain sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan serapan tenaga kerja pada masa pandemi COVID-19. Pada Agustus 2020, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 0,49 poin, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan sebesar 0,12 poin. Ketika ekonomi kembali mulai membaik di Agustus 2021, penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut kembali membaik. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor justru lebih baik daripada kondisi sebelum pandemi yaitu Agustus 2019.

Pandemi memberi dampak terhadap kinerja perusahaan, hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan bahwa sekitar 88 persen perusahaan merugi (kemnaker.go.id, 2020). Sebagian perusahaan tetap mempekerjakan karyawannya, sebagian lagi meresponnya dengan memberlakukan pemutusan hubungan kerja dan atau merumahkan karyawannya. Dampak dari kebijakan ini salah satunya berefek pada pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor industri dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini terlihat pada penurunan tenaga kerja di kedua sektor tersebut di bulan Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang mampu bertahan serta tetap tangguh selama pandemi COVID-19 di Riau.

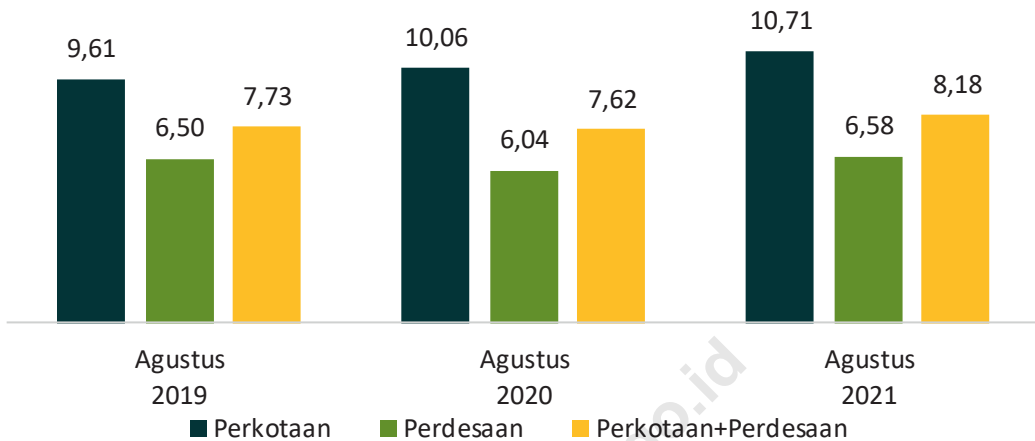
Gambar 2.8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan Menurut Jenis Kelamin di Riau, 2019-2021



Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Gambar 2.8 memperlihatkan bahwa persentase tenaga kerja laki-laki lebih tinggi di sektor industri pengolahan dibandingkan tenaga kerja perempuan. Demikian halnya dengan sektor lain seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Jika ditelusuri lebih lanjut, tenaga kerja laki-laki ini lebih banyak terserap di sektor formal. Sedangkan tenaga kerja perempuan lebih banyak terserap di sektor informal.

Gambar 2.9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Riau, 2019-2021



Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Di sisi lain, persentase tenaga kerja di daerah perkotaan sampai saat ini masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Hanya saja dampaknya ketika masa pandemi lebih terasa di daerah perdesaan, karena di perkotaan pandemi tidak memberi dampak pada tenaga kerjanya.

Dilihat menurut kabupaten kota, sebanyak lima kabupaten/kota mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan di masa pandemi COVID-19 sebagaimana pola provinsi Riau. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan dan Rokan Hilir, meskipun mampu bertahan atau meningkat kembali ketika ekonomi mulai pulih di masa pandemi, namun belum senormal sebelum pandemi, sedangkan Kabupaten Kampar dan Kota Dumai mampu melampaui keadaan sebelum pandemi. Sebanyak empat kabupaten/kota tetap mengalami pertumbuhan tenaga kerja yang positif, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang menyerap tenaga kerja tertinggi di sektor industri pengolahan pada Agustus 2019, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja kembali pada Agustus 2021 setelah sempat turun selama pandemi (Agustus 2020).

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	4,56	5,88	5,78
Indragiri Hulu	5,89	6,60	6,40
Indragiri Hilir	11,10	9,80	10,41
Pelalawan	5,85	4,68	5,57
Siak	14,43	12,54	11,81
Kampar	6,35	6,31	7,40
Rokan Hulu	4,59	5,31	6,02
Bengkalis	6,10	7,31	8,36
Rokan Hilir	5,85	4,02	4,78
Kep. Meranti	7,36	7,57	9,11
Kota Pekanbaru	8,69	9,62	10,00
Kota Dumai	12,25	11,77	14,16

Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

KUALITAS PEKERJAAN

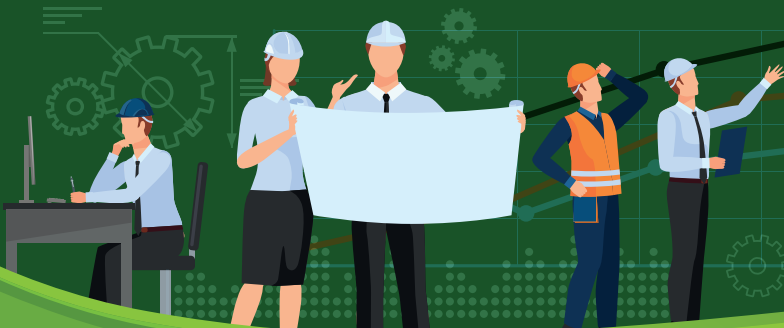
Persentase Pekerja Penuh Waktu



Persentase Pekerja dengan Jam kerja 35-48 Jam per Minggu



Persentase Pekerja Formal



Sumber:
Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah) dan Survei Angkatan Kerja Nasional Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Dimensi kualitas pekerjaan menggambarkan pekerjaan yang layak. Salah satu pendekatannya dilihat dari sisi penggunaan waktu bekerja dengan kondisi jam kerja yang tidak berlebih. Selain itu, kualitas pekerjaan dapat dilihat dari status pekerjaan apakah formal atau informal. Pekerja informal cenderung memiliki upah yang relatif kecil, keterampilan rendah, dan tidak memiliki jaminan sosial.

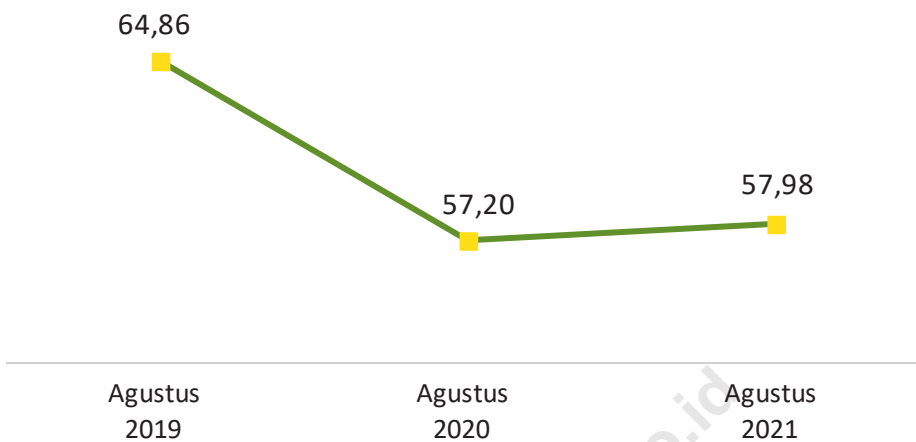
Pada pembahasan ini dimensi kualitas pekerjaan diukur dengan menggunakan tiga indikator yakni persentase pekerja dengan jam kerja normal yakni 35-48 jam/minggu, persentase pekerja formal, dan persentase pekerja penuh waktu (*full time*). Langkah selanjutnya adalah membandingkan data pada tiga titik waktu yang berbeda yakni Agustus 2019 yang mewakili periode sebelum Covid-19, Agustus 2020 yang mewakili periode ketika COVID-19 dimana ekonomi belum pulih, dan Agustus 2021 yang mewakili periode ketika ekonomi mulai pulih di masa pandemi COVID-19. Dengan begitu dapat diketahui gambaran dari dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan regional di awal tahun 2021 terhadap perkembangan dari ketiga indikator tersebut.

Pekerja Penuh Waktu

Salah satu indikator yang menggambarkan kualitas pekerjaan adalah jenis pekerjaan apakah pekerjaan *full time* (penuh waktu) atau part time (paruh waktu). Pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal atau dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (BPS, 2021c). Dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan salah satunya adalah pengurangan jam kerja (ILO & OECD, 2020).

Tren persentase pekerja penuh waktu di Riau sempat mengalami penurunan dari Agustus 2019. Persentasenya kembali meningkat pada Agustus 2021 namun belum sebaik kondisi sebelum pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari turunnya persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja penuh waktu dari 64,86 persen pada Agustus 2019 menjadi 57,20 persen pada Agustus 2020 atau turun 7,66 persen poin. Sementara pada periode berikutnya (Agustus 2020-Agustus 2021) kembali meningkat sebesar 0,78 persen poin. Berbagai program stimulus fiskal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdampak pada perbaikan ekonomi di awal tahun 2021. Hal ini mempengaruhi tren penurunan pada persentase pekerja penuh waktu, ditunjukkan dari peningkatan pekerja penuh waktu pada Agustus 2021.

Gambar 3.1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Penuh Waktu di Riau, 2019-2021



Sumber: Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Jika dilakukan analisis pada level kabupaten/kota (Tabel 3.1) diketahui bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada turunnya persentase pekerja penuh waktu di seluruh kabupaten/kota di Riau. Seluruh kabupaten/kota di Riau pada Agustus 2020 mengalami penurunan pada proporsi pekerja penuh waktu dibandingkan dengan Agustus 2019, dimana penurunan paling tajam terjadi di Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan masing-masing sebesar 13,87 persen dan 12,34 persen. Perbaikan ekonomi yang terjadi di bulan Agustus tahun 2021 juga membawa perbaikan pada angka persentase pekerja penuh waktu yang tercermin dari meningkatnya persentase pekerja penuh waktu di lima kabupaten/kota se-Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai, sedangkan sisanya tetap mengalami penurunan persentase. Kenaikan persentase pekerja penuh waktu tertinggi terjadi di Kota Dumai sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara itu, Kota Pekanbaru dan Dumai memiliki persentase pekerja penuh waktu tertinggi dibandingkan dengan 10 kabupaten yang lain dengan persentase masing-masing mencapai 83,89 persen dan 72,32 persen di Agustus 2019. Namun, kedua kota tersebut memperlihatkan tren penurunan persentase di sepanjang periode hingga menjadi sekitar 76,73 persen dan 67,57 persen di Agustus 2021. Di sisi lain, Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja penuh waktu paling sedikit.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Penuh Waktu Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021

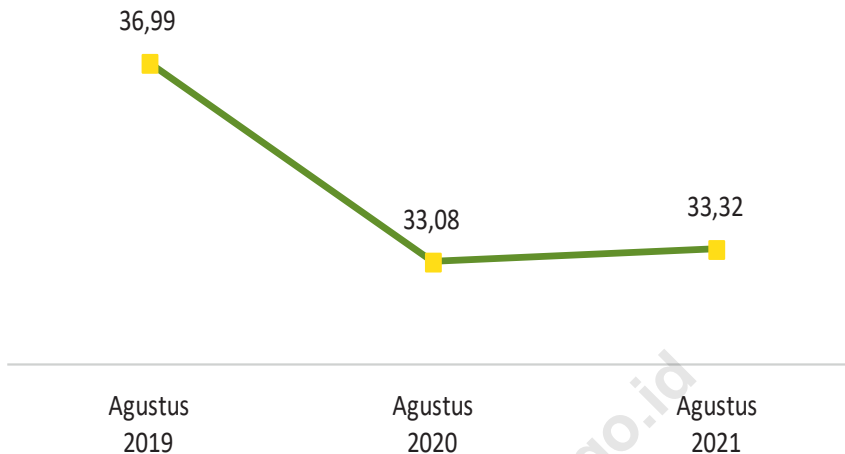
Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	53,33	46,64	45,81
Indragiri Hulu	55,43	50,94	52,20
Indragiri Hilir	58,91	58,07	59,04
Pelalawan	66,22	53,88	53,72
Siak	65,97	61,83	60,02
Kampar	63,6	54,49	54,04
Rokan Hulu	56,14	46,76	51,42
Bengkalis	64,30	50,43	57,03
Rokan Hilir	59,87	50,05	49,34
Kep. Meranti	52,59	51,42	49,24
Kota Pekanbaru	83,89	76,97	76,73
Kota Dumai	72,32	60,78	67,57

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Pekerja dengan Jam Kerja Normal (35-48 Jam Seminggu)

Salah satu indikator yang dapat menjadi pendekatan dalam menggambarkan pekerjaan layak adalah dari sisi penggunaan waktu bekerja dengan kondisi jam kerja yang tidak berlebih/*exceeds working hours* (BPS, 2021c). Jam kerja yang berlebih mengganggu produktivitas dan kesehatan pekerja itu sendiri terlebih di masa pandemi COVID-19 ini.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama 35-48 Jam per Minggu di Riau, 2019-2021



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Indikator persentase pekerja dengan jam kerja normal juga turun secara signifikan pada Agustus 2020, sebesar 3,91 persen poin dibandingkan Agustus 2019. Sementara itu, di Agustus 2021, persentase pekerja yang bekerja selama 35-48 jam per minggu mengalami kenaikan seiring dengan pemulihan ekonomi di awal tahun 2021, namun kenaikannya belum mencapai level sebelum terjadinya pandemi.

Perkembangan indikator pekerja dengan jam kerja 35-48 jam per minggu di sebagian besar kabupaten/kota juga menunjukkan pola yang serupa dengan perkembangan series yang terjadi pada level provinsi. Pada Agustus 2020, 10 kabupaten/kota kecuali Kabupaten Indragiri Hilir dan Siak, mengalami penurunan pada persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja normal dengan penurunan paling tajam terjadi di Kota Dumai dan Kabupaten Kampar yang masing-masing turun sebesar 8,86 persen poin dan 7,18 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa, COVID-19 berpengaruh hingga skala regional. Sementara itu, sinyal pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 juga terwakilkan oleh indikator persentase pekerja dengan jam kerja normal di sebagian besar kabupaten/kota yang mengalami kenaikan di Agustus 2021.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama 35-48 Jam per Minggu Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021

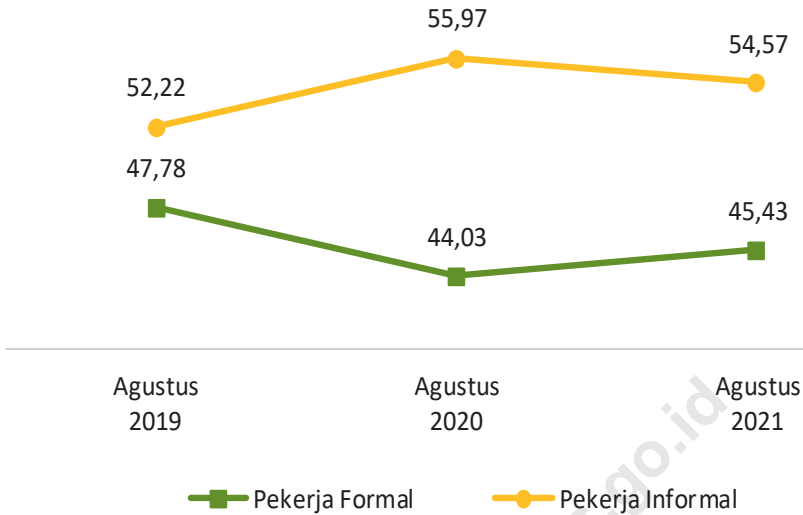
Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	31,00	24,24	24,23
Indragiri Hulu	31,27	28,15	28,25
Indragiri Hilir	32,43	32,50	31,07
Pelalawan	37,81	32,47	33,53
Siak	38,10	38,36	37,76
Kampar	38,94	31,76	32,76
Rokan Hulu	31,84	26,10	27,92
Bengkalis	37,46	34,13	34,92
Rokan Hilir	33,00	28,04	27,60
Kep. Meranti	28,68	28,44	28,00
Kota Pekanbaru	47,26	44,78	44,91
Kota Dumai	40,05	31,20	35,45

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021 (diolah)

Pekerja Formal

Status penduduk bekerja di kegiatan formal atau informal dapat menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas pekerjaan. Pengklasifikasian sektor formal dan informal menggunakan pendekatan berdasarkan status pekerjaan utama. Pekerja formal mencakup penduduk bekerja dengan status bekerja berusaha sendiri dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, pekerja informal mencakup pekerja yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, dan pekerja keluarga/ tidak dibayar. Pekerja informal cenderung memiliki upah/pendapatan yang relatif kecil, keterampilan dan pendidikan yang relatif rendah, dan tidak memiliki jaminan sosial (BPS, 2020b).

Gambar 3.3. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal di Riau, 2019-2021



Sumber: Publikasi Indikator Tenaga Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021

Persentase pekerja formal mengalami penurunan dari 47,78 persen pada Agustus 2019 menjadi 44,03 persen pada Agustus 2020. Seiring dengan kondisi perekonomian nasional yang mulai pulih, persentase penduduk yang berstatus pekerja formal mengalami peningkatan menjadi 45,43 persen pada Agustus 2021. Berbanding terbalik dengan pekerja formal, persentase pekerja informal meningkat dari 52,22 persen pada Agustus 2019 menjadi 55,97 pada Agustus 2020. Seiring dengan peningkatan persentase pekerja formal, persentase pekerja informal menurun menjadi 54,57 pada tahun 2021.

Disagregasi wilayah berdasarkan kabupaten/kota pada periode sebelum pandemi, saat pandemi, dan saat ekonomi mulai pulih di masa pandemi menunjukkan bahwa perkembangan persentase pekerja formal sebagian besar kabupaten/kota serupa dengan perkembangan persentase pada level provinsi. Hampir seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan persentase pekerja formal pada saat pandemi (Agustus 2020) dengan penurunan paling signifikan terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hulu yang masing-masing turun sebesar 8,38 persen poin dan 7,51 persen poin dibandingkan Agustus 2019.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal Menurut Kabupaten/Kota di Riau, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	42,56	40,74	39,40
Indragiri Hulu	44,77	40,08	42,81
Indragiri Hilir	27,07	22,32	24,04
Pelalawan	48,67	43,45	46,27
Siak	52,23	49,98	48,02
Kampar	48,14	42,61	42,25
Rokan Hulu	44,53	37,02	40,43
Bengkalis	50,13	46,72	48,83
Rokan Hilir	39,76	36,86	44,31
Kep. Meranti	44,79	36,41	38,91
Kota Pekanbaru	65,61	64,78	64,69
Kota Dumai	60,01	57,24	57,95

Sumber: Publikasi Indikator Tenaga Kerja Provinsi Riau Agustus 2019, 2020 dan 2021

Indikasi pemulihan ekonomi makro pada level kabupaten/kota juga tergambar pada perbaikan indikator persentase pekerja formal di mayoritas kabupaten/kota pada Agustus 2021, dengan kenaikan persentase terbesar terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Namun, masih terdapat empat kabupaten/kota yang tetap mengalami penurunan persentase pekerja formal, dimana penurunan paling tajam terjadi di Kabupaten Siak dan Kuantan Singingi.

KOMPETENSI TENAGA KERJA

Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas (Ribuan Rupiah)



Agustus 2020
47,09

Agustus 2019
30,49

Agustus 2019
37,58

Agustus 2020
35,45

Indeks Kesempatan Kerja Provinsi Riau



Indeks Kompensasi Tenaga Kerja Provinsi Riau

Sumber:
Sakernas diolah, BPS dan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, BPS

A. Kompensasi Tenaga Kerja

Dampak COVID-19 terhadap Pendapatan Tenaga Kerja

Hantaman pandemi COVID-19 tak hanya berimbas pada sektor kesehatan, namun juga memukul aktivitas perekonomian dan sosial Provinsi Riau. Dampak secara langsung terhadap ekonomi tercermin dari perubahan pasar, seperti permintaan (konsumsi dan investasi), pasokan produksi barang dan jasa, serta pasar kerja (ILO, 2020). Demi menghambat penyebaran kasus COVID-19, pemerintah terpaksa menerapkan kebijakan penguncian wilayah (lock down) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini mengakibatkan perekonomian Riau terkontraksi sehingga banyak usaha yang mengalami kebangkrutan. Dahsyatnya dampak pandemi ini memaksa perusahaan melakukan penyesuaian mulai dari mengurangi jumlah pekerja hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kondisi yang serba terbatas ini menekan produktivitas dan operasional perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan tidak optimal. Sebagai konsekuensi, pihak perusahaan menjadi terganggu untuk memberikan kompensasi yang layak kepada para pekerjanya. Di sisi lain, situasi pasar lesu akibat rumah tangga yang cenderung menunda pengeluarannya menyebabkan penurunan pendapatan pelaku usaha. Akibatnya, terjadi penurunan permintaan tenaga kerja yang merupakan salah satu input produksi.

Mulai membaiknya kinerja ekonomi Riau paska ledakan COVID-19, diharapkan dapat membuat roda bisnis perlahan berputar menuju normal. Situasi tersebut akan berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat. Pada bagian ini akan dibahas mengenai tingkat pendapatan masyarakat, baik yang berusaha sendiri, bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan, maupun pekerja bebas, pada periode pemulihan ekonomi. Selanjutnya akan dibandingkan antara kondisi saat ini dengan kondisi sebelum serta di tengah pandemi. Analisis mendalam juga disajikan mengenai rata-rata pendapatan atau upah yang didapat para pekerja maupun pengusaha.

Tingkat penyebaran COVID-19 yang bervariasi antar wilayah memberikan dampak terhadap kondisi usaha dan perekonomian antar daerah yang juga tidak seragam. Hal ini terindikasi dari dampak pandemi terhadap tingkat kompensasi tenaga kerja antar wilayah juga berbeda. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dilihat pula variasi tingkat pendapatan antar kabupaten/kota. Diharapkan dari hasil analisis ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang berujung pada pemulihan ekonomi regional.

Upah Pekerja/Buruh/Karyawan

Saat ini Riau didominasi oleh penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih (riau.bps.go.id). Mayoritas penduduk yang bekerja adalah mereka yang berstatus sebagai pekerja/buruh/karyawan/pegawai. Maka dari itu, ketika pandemi datang dan mengacaukan perekonomian, maka kelompok yang pertama kali terkena imbasnya adalah penduduk kelas pekerja. Ketergantungan hidup mereka terhadap sektor industri, jasa-jasa, pariwisata, hingga perdagangan mengharuskan mereka angkat tangan ketika COVID-19 mulai masuk ke Riau. Mengingat porsi besar penduduk Riau yang bekerja sebagai buruh/ pegawai/karyawan, maka sangat penting untuk menelaah bagaimana situasi krisis saat ini mempengaruhi tingkat pendapatan mereka.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai di Riau terus meningkat namun belum mampu menembus Rp 3 juta/bulan. Pada Agustus 2020, situasi pandemi memukul tingkat pendapatan kelas pekerja hingga Rp 2,69 juta/bulan. Kondisi tersebut masih berlanjut hingga mengalami penurunan 2,44 persen pada Agustus 2021 atau menjadi 2,63 juta rupiah per bulan. Hal ini diduga karena kondisi perekonomian yang masih belum stabil akibat pandemi. Namun demikian, angka penurunan tersebut tidak setinggi pada periode sebelumnya sebesar 3,84 persen dibandingkan Agustus 2019 (bps.go.id).

Kabupaten dengan kenaikan rata-rata upah buruh tertinggi pada Agustus 2021 adalah Indragiri Hilir yang mencapai 12,47 persen dibandingkan Agustus 2020. Sedangkan Kota Pekanbaru masih meneruskan tren negatif rata-rata upah buruh di mana kini mengalami penurunan 6,72 persen dibandingkan Agustus 2020. Sedikit bergeser ke bagian utara Provinsi Riau, tepatnya Kota Dumai yang sebelumnya terdampak cukup signifikan akibat pandemi. Penurunan rata-rata upah buruh di Kota Dumai mencapai 9,66 persen pada Agustus 2020, kini menunjukkan tren membaik dengan kenaikan sekitar 3,90 persen pada Agustus 2021. Angka kenaikan ini jauh lebih baik dari upah secara rata-rata Provinsi Riau yang justru masih mengalami penurunan.

Tabel 4.1. Rata-Rata Upah Pekerja/Buruh/Karyawan menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah), 2019-2021

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	64,54	68,28	67,02
Indragiri Hulu	65,94	68,42	68,45
Indragiri Hilir	64,44	69,17	68,56
Pelalawan	69,00	68,21	69,18
Siak	64,77	62,78	64,69
Kampar	60,78	63,78	63,06
Rokan Hulu	67,85	65,26	66,50
Bengkalis	64,08	66,00	66,76
Rokan Hilir	61,21	56,54	60,74
Kep. Meranti	67,49	68,29	65,60
Kota Pekanbaru	65,86	65,22	61,61
Kota Dumai	69,12	67,15	64,91

Sumber: Sakernas diolah, BPS

Jika dibandingkan antara periode sebelum pandemi (Agustus 2019) dengan periode saat pandemi (Agustus 2020), tercatat ada hampir semua kabupaten/kota mengalami penurunan rata-rata upah buruh/pegawai/karyawan. Penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, dari yang sebelumnya mencapai Rp 2,27 Juta/bulan menjadi Rp 2,24 Juta/bulan. Hal ini turut disebabkan oleh lesunya sektor industri pengolahan dan perdagangan yang menjadi kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan, kabupaten yang mampu mencatat kenaikan tingkat pendapatan buruh di tengah amukan pandemi adalah Rokan Hilir. Rata-rata upah buruh di kabupaten ini setara dengan Rp 2,44 Juta/bulan.

Berikutnya, apabila membandingkan antara periode saat pandemi di Riau terjadi (Agustus 2020) dengan periode transisi pemulihan ekonomi setelah pandemi (Agustus 2021), meskipun sebagian besar kabupaten/kota masih mengalami penurunan tingkat upah buruh, namun jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan bertambah dari periode sebelumnya. Pada periode ini setidaknya ada lima kabupaten/kota yang mengalami kenaikan rata-rata upah buruh, di antaranya adalah Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai. Kenaikan tertinggi dicatat

di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan rata-rata upah buruh mencapai Rp 2,27 Juta/bulan, dari yang sebelumnya Rp 2,02 Juta/bulan. Namun, di sisi lain beberapa kabupaten masih tercatat mengalami penurunan rata-rata upah yang cukup signifikan. Kabupaten Siak misalnya, turun menjadi Rp 2,69 Juta/bulan dari yang sebelumnya Rp 3,00 Juta/bulan, atau mengalami penurunan tingkat upah lebih dari 10 persen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia di awal Maret 2020, berakibat semakin memburuknya rata-rata upah buruh baik secara nasional maupun regional. Hal ini dapat dilihat dari fenomena penurunan tingkat pendapatan buruh hingga periode Agustus 2020. Namun, setelah pandemi dapat dikendalikan dan ekonomi kembali menggeliat di Bumi Lancang Kuning, rata-rata upah buruh/pegawai/karyawan kembali beranjak naik di beberapa kabupaten/kota di Riau. Jika momentum ini mampu dijaga, maka pemulihan ekonomi regional akan terus membaik.

Akan tetapi, untuk lebih jauh melihat apakah pertumbuhan ekonomi mampu mengangkat kondisi ketenagakerjaan maka selanjutnya akan dilihat bagaimana tingkat pendapatan pada kelompok pekerja bebas dan juga mereka yang berusaha sendiri, karena meskipun jumlahnya tidak sebanyak buruh/pegawai/ karyawan, namun dampak negatif dari krisis akan sangat mudah mengantarkan kelompok ini menuju jurang kemiskinan.

Pendapatan Pekerja yang Berusaha Sendiri

Salah satu pekerjaan penduduk yang juga rawan terdampak pandemi COVID-19 adalah wirausaha. Dalam istilah kependudukan dan ketenagakerjaan, lazim dikenal sebagai penduduk yang berusaha sendiri. Beberapa tahun terakhir tercatat jumlah wirausahawan atau penduduk yang berusaha sendiri meningkat cukup signifikan. Namun, situasi yang penuh ketidakpastiaan saat ini sangatlah tidak menguntungkan bagi mereka, mengingat, karakteristik pekerjaan ini menuntut penduduk untuk menanggung risiko kerugiannya sendiri.

Berdasarkan konsep BPS, wirausaha atau berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Risiko yang dimaksud di sini yaitu tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut. Sifat pekerjaan ini memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Ketika situasi ekonomi dalam kondisi yang baik, maka penduduk yang berusaha sendiri dapat menikmati hasil jerih payah usahanya secara maksimal. Namun, ketika terjadi guncangan ekonomi seperti saat ini, maka tidak jarang banyak usaha yang harus gulung tikar karena tidak sanggup menanggung kerugian yang dialaminya.

Penduduk yang berstatus berusaha sendiri mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Jenis aktivitas yang diusahakan banyak tergolong kategori informal. Adapaun fakta bahwa sebagian besar lapangan usaha dari penduduk dengan status pekerjaan ini berasal dari sektor pertanian dan perdagangan. Meski demikian, sektor pertanian terbukti mampu untuk terus tumbuh positif selama pandemi. Hal ini berbanding terbalik dengan sektor perdagangan yang terdampak cukup signifikan. Dengan demikian, perkembangan tingkat pendapatan penduduk yang berusaha sendiri dapat menjadi elemen kuat untuk melihat pengaruh perbaikan kondisi ekonomi terhadap situasi ketenagakerjaan di Riau.

Selama ini penduduk yang berusaha sendiri memiliki tingkat pendapatan yang tidak lebih baik dari mereka yang berstatus sebagai buruh/pegawai/karyawan. Dalam kurun waktu 3 tahun, rata-rata pendapatan penduduk yang berusaha sendiri di Riau hanya berkisar antara Rp 1,5 juta – 2,1 juta/bulan. Pada Agustus 2019, tingkat pendapatan pekerja yang berusaha sendiri sempat menyentuh angka tertinggi selama beberapa tahun terakhir yaitu sebesar Rp 2,12 Juta/bulan. Namun kemudian terus tergerus akibat terdampak pandemi hingga menyentuh level Rp 1,83 Juta/bulan pada Agustus 2021.

Tabel 4.2. Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah), 2019-2021

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	1.446,61	1.275,07	1.330,56
Indragiri Hulu	1.961,86	1.746,66	1.573,80
Indragiri Hilir	2.516,09	1.972,15	1.694,01
Pelalawan	2.440,45	2.510,16	2.653,68
Siak	1.945,60	2.142,67	1.642,00
Kampar	2.008,55	2.045,88	1.658,27
Rokan Hulu	1.991,12	1.726,43	1.901,15
Bengkalis	1.991,88	1.732,48	1.780,23
Rokan Hilir	2.067,80	2.151,12	2.187,79
Kep. Meranti	1.258,10	1.085,63	1.053,68
Kota Pekanbaru	2.572,10	2.602,27	2.172,59
Kota Dumai	2.197,55	1.358,18	1.696,73

Sumber: Sakernas diolah, BPS

Turunnya tingkat pendapatan penduduk yang berusaha sendiri tercermin pada tingkat regional. Mayoritas rata-rata pendapatan wirausahawan di kabupaten/kota mengalami penurunan selama periode Agustus 2019 hingga Agustus 2021. Dumai merupakan kota dengan kenaikan rata-rata tertinggi pada Agustus 2021, mencapai 24,93 persen dibandingkan Agustus 2020. Hal ini seiring dengan mulai dibukanya kembali perdagangan internasional dimana salah satu pintu masuknya melalui pelabuhan di Kota Dumai. Sebelumnya, pendapatan penduduk yang bekerja sendiri di Kota Dumai terperosok hingga Lebih dari 38 persen pada Agustus 2020. Sementara itu, Kabupaten Siak mengalami penurunan tertinggi pada Agustus 2021, yaitu hingga 23,37 persen dibandingkan Agustus 2020.

Jika dibandingkan antara periode sebelum pandemi (Agustus 2019) dengan periode saat pandemi (Agustus 2020), tercatat bahwa penurunan pendapatan penduduk yang berusaha sendiri mayoritas terjadi di kabupaten/kota. Penurunan tertinggi terjadi di Kota Dumai, dari yang sebelumnya mencapai Rp 2,20 Juta/bulan menjadi Rp 1,36 Juta/bulan. Sektor perdagangan yang memberikan sumbangan cukup besar di kota Dumai memaksa penduduk yang berusaha sendiri di sektor ini harus tutup selama masa-masa awal pandemi COVID-19. Kabupaten lain yang juga mengalami penurunan rata-rata upah cukup dalam adalah Indragiri Hilir. Peranan sektor perdagangan yang menduduki 3 besar di kabupaten ini membuat Indragiri Hilir ikut merasakan dampak yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19. Hal ini memaksa para pengusaha untuk bertahan lebih keras lagi mengingat tingginya penurunan tingkat pendapatan mereka. Tercatat pada Agustus 2019 rata-rata pendapatan yang berusaha sendiri sebesar Rp 2,52 juta/bulan. Dalam kurun waktu 12 bulan turun menjadi Rp 1,97 juta/bulan.

Peristiwa serupa juga ditemukan pada periode transisi pemulihan ekonomi (Agustus 2020 – Agustus 2021). Dari total 12 kabupaten/kota, sebagian masih mencatatkan penurunan rata-rata pendapatan pekerja berusaha sendiri. Jika ditinjau lebih jauh, Kota Dumai yang tercatat mengalami kenaikan rata-rata tertinggi. Pendapatan bersih wirausahawan di Kota Dumai pada Agustus 2021 meningkat lebih dari Rp 300 ribu/bulan, di mana kini mencapai Rp 1,70 juta/bulan. Namun, angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode Agustus 2019.

Hasil penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pada periode awal dan ketika pandemi melanda Riau, tingkat pendapatan menurun di sebagian besar kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota yang terdampak sangat kuat oleh penyebaran COVID-19 sehingga mengalami penurunan yang signifikan, seperti Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Dumai. Sementara, ketika

ekonomi mulai bangkit pada tahun 2021, tingkat pendapatan pengusaha yang berusaha sendiri di beberapa kabupaten/kota mulai merangkak naik meskipun belum merata. Selanjutnya akan dianalisis perkembangan kondisi pendapatan pekerja bebas untuk semakin meyakinkan bahwa perbaikan ekonomi turut membawa perbaikan ketenagakerjaan.

Pendapatan Pekerja Bebas

Selain status pekerjaan penduduk yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terdapat juga status lain yang tak kalah rawan dari dampak pandemi. Beberapa profesi seperti tukang bangunan lepas, tukang gali harian, atau kuli panggul pasar termasuk kelompok pekerja bebas. Karakteristik utama status pekerjaan ini adalah tidak memiliki majikan (tetap lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir). Biasanya bekerja dengan diberikan upah sesuai dengan jumlah hari atau waktu bekerja. Penduduk yang bekerja seperti ini bukan merupakan golongan buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas.

Ada dua golongan yang termasuk pekerja bebas, yaitu pekerja bebas di sektor pertanian dan pekerja bebas di sektor non pertanian. Usaha pertanian meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. Sementara, usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, konstruksi/persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan.

Dahsyatnya hantaman COVID-19 mengakibatkan sebagian buruh kehilangan pekerjaannya karena PHK sehingga memaksa mereka beralih status menjadi pekerja bebas. Hal tersebut dilakukan guna menyikapi kondisi yang tidak menentu akibat pandemi. Sehingga, terjadi lonjakan jumlah pekerja bebas pada masa pandemi. Ditinjau dari segi pendapatan, nilai yang diterima pekerja bebas mengalami penurunan akibat dari lesunya perekonomian dan rendahnya kemampuan pasar untuk memberikan upah yang lebih baik.

Tabel 4.3. Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah), 2019-2021

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Singingi	1.438,44	1.028,61	1.363,11
Indragiri Hulu	1.372,80	1.348,54	1.407,11
Indragiri Hilir	1.176,49	1.256,50	1.259,79
Pelalawan	1.848,45	1.612,30	1.818,70
Siak	1.654,15	1.761,61	1.729,87
Kampar	1.955,10	1.430,10	1.615,24
Rokan Hulu	1.470,44	1.663,25	1.746,60
Bengkalis	1.799,87	1.757,88	1.810,51
Rokan Hilir	1.543,14	1.693,54	1.593,50
Kep. Meranti	1.332,01	1.232,97	1.166,11
Kota Pekanbaru	1.833,55	2.023,71	1.559,80
Kota Dumai	1.522,84	1.561,61	1.529,45

Sumber: Sakernas diolah, BPS

Status pekerja bebas termasuk ke dalam kategori pekerjaan informal dan kompensasi yang relatif kecil. Selain itu, memiliki kesempatan kerja yang tidak menentu. Pada Agustus 2019 sebelum pandemi, dalam sebulan buruh lepas memiliki pendapatan rata-rata sebesar Rp 1,56 juta/bulan. Angka ini terus merosot sepanjang pandemi hingga sempat menyentuh Rp 1,53 juta/bulan pada Agustus 2020. Ketika bisnis mulai menggeliat pada Agustus 2021, tingkat pendapatan pekerja bebas sedikit meningkat ke Rp 1,57 juta/bulan. Angka tersebut telah melampaui pendapatan rata-rata pada Agustus 2019.

Merujuk pada Tabel 4.2, gambaran pendapatan pekerja bebas bervariasi antar kabupaten/kota. Tidak membentuk pola tertentu di mana tingkat pendapatan pekerja bebas tampak berfluktuasi. Kabupaten dengan kenaikan rata-rata tertinggi pada Agustus 2021 adalah Kuantan Singingi yang mencapai 32,52 persen dibandingkan Agustus 2020. Sebelumnya, pendapatan penduduk yang bekerja bebas di Kabupaten Kuantan Singingi turun hingga hampir 28,49 persen pada Agustus 2020. Sementara itu, penurunan paling tinggi rata-rata upah buruh bebas terjadi di Kota Pekanbaru yang sebesar 22,92 persen pada Agustus 2021 dibandingkan Agustus 2020.

Jika dibandingkan antara periode sebelum pandemi (Agustus 2019) dengan periode saat pandemi (Agustus 2020), tercatat bahwa setengah dari total 12 kabupaten/kota di Riau mengalami penurunan rata-rata upah pekerja bebas. Penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, dari yang sebelumnya mencapai Rp 1,44 Juta/bulan menjadi Rp 1,03 Juta/bulan. Kabupaten lainnya yang juga mengalami penurunan rata-rata upah cukup dalam adalah Kampar. Tercatat pada Agustus 2019 rata-rata upah pekerja bebas sebesar Rp 1,96 juta/bulan. Dalam kurun waktu 12 bulan turun menjadi Rp 1,43 juta/bulan.

Jika menilik pada periode transisi pemulihan ekonomi (Agustus 2020 – Agustus 2021), ternyata jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat upah pekerja bebas meningkat menjadi sebanyak lima kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan tingkat upah buruh/karyawan serta penduduk yang bekerja sendiri di mana pada periode ini jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan rata-rata upah atau pendapatan meningkat. Yang menarik adalah kabupaten/kota yang cukup baik di periode awal pandemi seperti Pekanbaru dan Dumai, justru mengalami penurunan tingkat pendapatan pekerja bebas yang sangat tinggi. Sementara itu, kenaikan tertinggi rata-rata upah pekerja bebas terjadi di Kuantan Singingi.

Kenaikan rata-rata upah pekerja bebas menarik untuk dicermati, mengapa bisa terjadi? Apakah hal ini berkaitan dengan perbaikan ekonomi atau disebabkan oleh fenomena lain. Jika perbaikan didefinisikan sebagai kenaikan tingkat pendapatan, maka perbaikan kondisi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi mulai tampak berpengaruh baik terhadap pendapatan pekerja bebas di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi.

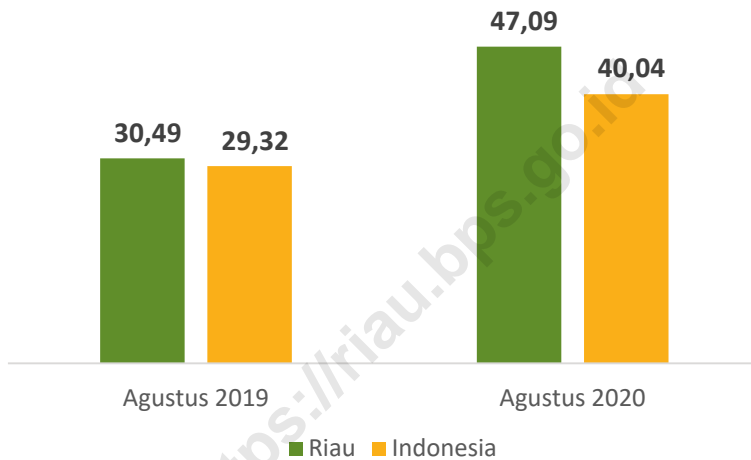
B. PERBANDINGAN KESEMPATAN KERJA, KUALITAS PEKERJAAN, DAN KOMPENSASI TENAGA KERJA

Gejolak ketenagakerjaan Indonesia, tak terkecuali Riau ditimbulkan oleh merebaknya pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentunya juga berdampak pada berbagai indikator lainnya, seperti dimensi kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, maupun kompensasi tenaga kerja. Pada bagian ini akan dibahas mengenai perbandingan kondisi ketenagakerjaan sebelum, selama, dan saat kondisi ekonomi mulai pulih di masa pandemi COVID-19 dengan melihat dari 3 nilai indeks (indeks kesempatan kerja, indeks kualitas pekerjaan, dan indeks kompensasi tenaga kerja).

Perbandingan Kesempatan Kerja

Perkembangan indikator pembentuk Indeks Kesempatan Kerja (IKK) selama periode pandemi COVID-19 menunjukkan adanya penurunan. Sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019, angka IKK nasional mencapai 47,09. Kemudian pada Agustus 2020 turun menjadi 40,04 saat masa pandemi COVID-19 berlangsung. Sejalan dengan angka nasional, IKK Provinsi Riau juga mengalami penurunan menjadi 29,32 pada Agustus 2020. Sedangkan, pada Agustus 2019 angka IKK Riau mencapai 30,49.

Gambar 4.1. Indeks Kesempatan Kerja Provinsi Riau dan Indonesia, 2019 & 2020



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, BPS

Bila dibandingkan antar provinsi di Pulau Sumatra, IKK tertinggi pada saat sebelum pandemi COVID-19 adalah Provinsi Bengkulu yang mencapai 52,08 pada Agustus 2019 dan 53,57 pada Agustus 2020. Sementara itu, capaian IKK terendah sebelum pandemi dicapai oleh Provinsi Aceh sebesar 24,38 (Agustus 2019) dan 28,64 (Agustus 2020). Pada waktu yang sama juga terdapat sekitar 3 provinsi (Agustus 2019) dan 4 provinsi (Februari 2021) di Pulau Sumatra yang mempunyai IKK sama dengan atau di atas angka nasional.

Tabel 4.4. Indeks Kesempatan Kerja Menurut Provinsi di Pulau Sumatra, 2019 & 2020

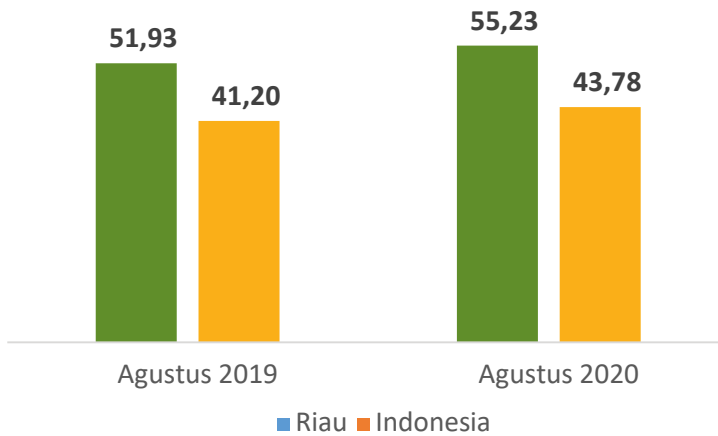
Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020
Aceh	24,38	28,64
Sumatera Utara	49,58	39,09
Sumatera Barat	41,99	40,04
Riau	30,49	29,32
Jambi	36,59	38,12
Sumatera Selatan	41,05	40,16
Bengkulu	52,08	53,57
Lampung	51,89	50,73
Kep. Bangka Belitung	44,07	38,3
Kepulauan Riau	40,13	33,84
Indonesia	47,09	40,04

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, BPS

Kendati demikian, jika ditinjau dari kecenderungan perubahan IKK antara periode Agustus 2019 dan Agustus 2020, terdapat sekitar 3 provinsi yang justru menunjukkan adanya peningkatan dengan peningkatan tertinggi terjadi Provinsi Aceh. Sementara itu, 7 provinsi lainnya mengalami penurunan indeks dengan penurunan terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi menunjukkan adanya keterpurukan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tentunya mendapat perhatian pemerintah untuk mengambil tindakan agar ekonomi kembali pulih sehingga meningkatkan kesempatan kerja.

Perbandingan Kualitas Pekerjaan

Sejalan dengan nilai IKK, kondisi Indeks Kualitas Pekerjaan (IKP) juga mengalami penurunan akibat dari menyebarnya pandemi COVID-19. Angka IKP nasional turun menjadi 43,78 pada Agustus 2020, sebelumnya mencapai 55,23 pada Agustus 2019.

Gambar 4.2. Indeks Kualitas Pekerja Provinsi Riau dan Indonesia, 2019 & 2020

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, BPS

Bila dibandingkan antar provinsi di Pulau Sumatra, hanya 3 provinsi yang mempunyai nilai IKP lebih tinggi dari angka nasional pada Agustus 2019. IKP tertinggi pada periode tersebut diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 94,60. Sementara itu, capaian IKP terendah diraih oleh Provinsi Lampung sebesar 31,47. Selanjutnya pada Agustus 2020, provinsi dengan nilai IKP di atas nasional masih sama jumlahnya, yakni 3 provinsi. Capaian IKP tertinggi kembali terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 87,58 dan IKP terendah juga masih diraih di Lampung sebesar 23,89.

Tabel 4.5. Indeks Kualitas Pekerjaan Menurut Provinsi di Pulau Sumatra, 2019 & 2020

Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020
Aceh	40,15	33,13
Sumatera Utara	55,69	46,52
Sumatera Barat	44,07	36,62
Riau	51,93	41,20
Jambi	45,41	37,23
Sumatera Selatan	44,43	38,19
Bengkulu	41,14	32,26
Lampung	31,47	23,89
Kep. Bangka Belitung	59,87	56,64
Kepulauan Riau	94,60	87,58
Indonesia	55,23	43,78

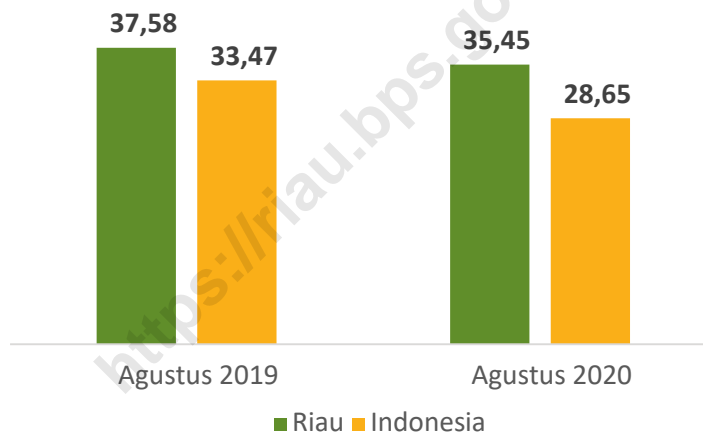
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, BPS

Kecenderungan pola perubahan IKP antara periode Agustus 2019 dan Agustus 2020 mengalami penurunan untuk seluruh provinsi di Pulau Sumatra. Penurunan tertinggi terjadi di Provinsi Lampung. Sementara itu, penurunan IKP terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perbandingan Kompensasi Tenaga Kerja

Kondisi Indeks Kompensasi Tenaga Kerja (IKM) juga sama seperti halnya perkembangan IKK dan IKP yang menunjukkan adanya penurunan akibat dari adanya pandemi COVID-19. Secara umum, IKM nasional menyentuh angka 35,45 pada Agustus 2019 dan mengalami penurunan menjadi 28,65 pada Agustus 2020. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan negatif nilai IKM karena terpuruk di masa pandemi.

Gambar 4.3. Indeks Kompensasi Tenaga Kerja Provinsi Riau dan Indonesia, 2019 & 2020



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, BPS

Pada Agustus 2019, 3 dari 10 provinsi di Pulau Sumatra mempunyai IKM di atas angka nasional. Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan nilai IKM tertinggi pada 2 periode yaitu Agustus 2019 yang sebesar 74,60 dan pada Agustus 2020 sebesar 67,25. Sementara itu, nilai IKM terendah dicapai oleh Provinsi Lampung selama periode Agustus 2019 dan Sumatera Selatan selama periode Agustus 2020.

Tabel 4.6. Indeks Kompensasi Tenaga Kerja Menurut Provinsi di Pulau Sumatra, 2019 & 2020

Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020
Aceh	23,46	22,71
Sumatera Utara	26,36	22,59
Sumatera Barat	29,45	25,90
Riau	37,58	33,47
Jambi	28,51	22,23
Sumatera Selatan	23,82	15,95
Bengkulu	25,55	21,23
Lampung	20,19	16,19
Kep. Bangka Belitung	42,82	27,87
Kepulauan Riau	74,60	67,25
Indonesia	35,45	28,65

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, BPS

Tercatat seluruh provinsi di Pulau Sumatra menunjukkan adanya penurunan IKM pada periode Agustus 2019 hingga Agustus 2020. Penurunan tertinggi terjadi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 34,91 persen. Sementara itu, penurunan IKM terendah terjadi di Provinsi Aceh sebesar 3,20 persen.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa secara umum pandemi COVID-19 telah menggoyahkan kondisi ketenagakerjaan Riau. Gejolak pandemi terlihat sangat nyata terhadap kondisi ketenagakerjaan dengan melihat perbandingan data Agustus 2019 dan Agustus 2020. Perbedaan kondisi ketenagakerjaan pada dimensi kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, dan kompensasi tenaga kerja terlihat cukup nyata. Artinya, ekonomi yang terpukul telah memberikan kondisi yang berbeda antara periode amatan. Dinamika perubahan kondisi yang begitu cepat di masa pandemi menghantam perekonomian yang berimbas pada kondisi ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020a). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2019. BPS: Pekanbaru.
- BPS. (2020b). Analisis Isu Terkini 2020. Jakarta: BPS.
- BPS. (2021a). [Online]. Diakses pada <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto-lapangan-usaha-.html#subjekViewTab5>. pada tanggal 15 September 2022.
- BPS. (2021b). Indikator Pasar Tenaga Kerja Februari 2021. Jakarta: BPS.
- BPS. (2021c). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021. Jakarta: BPS.
- BPS. (2021d). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2020. BPS: Pekanbaru.
- BPS. (2022). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau Agustus 2021. BPS: Pekanbaru.
- BPS. (2022a). Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Riau Agustus 2021. BPS: Pekanbaru.
- Chang, W. H. (2020). Understanding the COVID-19 Pandemic from a Gender Perspective. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*, 59(6), 801–807. <https://doi.org/10.1016/j.tjog.2020.09.004>
- ILO & OECD. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on jobs and incomes in G20 economies, s.l.: Saudi Arabia's G20 Presidency 2020.
- ILO. (2015). International Labor Organization. [Online]. Diakses pada https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/publication/wcms_422091.pdf. pada tanggal 15 September 2022.
- Kemnaker. (2020). Laporan Tahunan Produktivitas dan Daya Saing Indonesia 2020. Jakarta: Kemnaker.
- Kemnaker. (2020). Survei Kemnaker : 88 persen Perusahaan Terdampak Pandemi COVID-19. Diakses dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>, pada tanggal 12 September 2022.
- Shammi, M., Bodrud-Doza, M., Towfiqul Islam, A. R. M., & Rahman, M. M. (2020). COVID-19 Pandemic, Socioeconomic Crisis and Human Stress in Resource-Limited Settings: A Case from Bangladesh. *Heliyon*, 6(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04063>
- Sindonews (2021). Stop Urbanisasi, Bangkitkan Ekonomi Desa. <https://ekbis.sindonews.com/read/408424/34/stop-urbanisasi-bangkitkan-ekonomi-desa-1619359468>

- Sukirno, Sadono. (2006). Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- bps.go.id. 2019. Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas*) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2019. <https://www.bps.go.id/statictable/2019/08/02/2063/rata-rata-pendapatan-bersih-pekerja-bebas-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-2019.html>. Diakses tanggal 10 September 2022.
- _____. 2019. Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri*) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2019. <https://www.bps.go.id/statictable/2019/08/02/2060/rata-rata-pendapatan-bersih-berusaha-sendiri-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-2019.html>. Diakses tanggal 10 September 2022.
- _____. 2019. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2019. <https://www.bps.go.id/statictable/2019/08/02/2070/rata-rata-upahgaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-provinsi-dan-jenis-pekerjaan-utama-2019.html>. Diakses tanggal 10 September 2022.
- _____. 2020. Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Bebas*) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2020. <https://www.bps.go.id/statictable/2020/07/07/2104/rata-rata-pendapatan-bersih-pekerja-bebas-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-2020.html>. Diakses tanggal 10 September 2022.
- _____. 2020. Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri*) Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2020. <https://www.bps.go.id/statictable/2020/07/07/2107/rata-rata-pendapatan-bersih-berusaha-sendiri-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-2020.html>. Diakses tanggal 10 September 2022.
- _____. 2020. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2020. <https://www.bps.go.id/statictable/2021/07/15/2130/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-2021.html>. Diakses tanggal 10 September 2022.

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru 28131
Telp. (0761) 23042, fax. (0761) 21336
Homepage : <http://riau.bps.go.id>